

JUSIE

(Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi)

Volume I, Nomor 01, Mei – Oktober 2016

Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan di Sumatera Barat

Penulis : Riphon Delzy Perkasa

Sumber : Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi, Volume I, Nomor 01, Mei – Oktober 2016

Diterbitkan oleh : Jurusan PIPS FKIP UMMY Solok

Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan di Sumatera Barat

Ripho Delzy Perkasa
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
Email: rdp_mpd@yahoo.co.id

ABSTRACT

Poverty is a problem that continues to be the focus of attention for the government. Various policy was adopted by the government to break the chain of poverty that continues to imprison people to escape from poverty. Poverty has made millions of children can not get an education of quality, difficulty to finance health care, lack of savings and lack of investment, lack of access public service, lack of jobs, lack of social security and social protection and the protection of the family, the strengthening of urbanization to the town and more severe poverty causes millions of people can not meet the needs of food, clothing and shelter as appropriate so that they can be said to be prosperous. In this paper the authors restrict the study of poverty and government policies in poverty reduction in West Sumatera. This research method is the study of literature. The findings from the data obtained can be seen that the level of poverty in Sumatera Barat from the years 2005-2010 continued to decline. In 2005 the number of poor people amounted to 482 800 with a percentage of 10.89%. In 2006 the number of poor people in West Sumatera experienced an increase of 550 251 inhabitants with a percentage of 12.51%. In this year poverty level are far greater than what is expected in the amount of 12.07%. Likewise, in 2007 the level of poverty in western Sumatera also incompatible with yag expected by the government in the amount of 11.26%. In this year the number of poor people in West Sumatera amounting to 529 200 with a percentage of 11.90%. In 2008 the number of poor people in West Sumatera has decreased and the level of poverty in West Sumatera is far below that have been targeted by the government at 10,85%. This year the amount of poverty in West Sumatera recorded 477 200 inhabitants with a percentage of 10.67%. So also in 2009 and 2010 the number of poor recorded is also less than the target set by the government.

Keywords: Poverty, West Sumatera

ABSTRAK

Kemiskinan adalah masalah yang terus menjadi fokus perhatian bagi pemerintah. Berbagai kebijakan diadopsi oleh pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan yang terus memenjarakan orang untuk keluar dari kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak tidak bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas, kesulitan untuk membiayai perawatan kesehatan, kurangnya tabungan dan kurangnya investasi, kurangnya akses layanan publik, kurangnya pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan sosial dan perlindungan masyarakat. keluarga, penguatan urbanisasi ke kota dan kemiskinan yang lebih parah menyebabkan jutaan orang tidak dapat memenuhi kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal yang sesuai sehingga mereka dapat dikatakan makmur. Dalam tulisan ini penulis membatasi studi tentang kemiskinan dan kebijakan pemerintah dalam pengurangan kemiskinan di Sumatera Barat. Metode penelitian ini adalah studi literatur.

Temuan dari data yang diperoleh dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan di Sumatera Barat dari tahun 2005-2010 terus menurun. Pada tahun 2005 jumlah penduduk miskin berjumlah 482.800 dengan persentase 10,89%. Pada tahun 2006 jumlah orang miskin di Sumatera Barat mengalami peningkatan 550.251 penduduk dengan persentase 12,51%. Pada tahun ini tingkat kemiskinan jauh lebih besar dari apa yang diharapkan sebesar 12,07%. Demikian juga, pada 2007 tingkat kemiskinan di Sumatera barat juga tidak sesuai dengan yang yang diharapkan pemerintah sebesar 11,26%. Pada tahun ini jumlah orang miskin di Sumatera Barat sebesar 529 200 dengan persentase 11,90% .. Pada tahun 2008 jumlah orang miskin di Sumatera Barat mengalami penurunan dan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat jauh di bawah yang telah ditargetkan oleh pemerintah sebesar 10,85%. Tahun ini jumlah kemiskinan di Sumatera Barat tercatat 477.200 jiwa dengan persentase 10,67%. Begitu juga pada 2009 dan 2010 jumlah penduduk miskin yang tercatat juga kurang dari target yang ditetapkan pemerintah.

Kata kunci: Kemiskinan, Sumatera Barat

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan yang terus menjadi fokus perhatian bagi pemerintah. Berbagai kebijakan pun ditempuh oleh pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan yang terus membelenggu masyarakat agar terlepas dari jeratan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses kelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota dan yang lebih parah kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan sebagai mana mestinya agar mereka dapat dikatakan sejahtera. Kemiskinan juga telah menyebabkan masyarakat rela mengorbankan apa saja untuk demi kelangsungan hidup mereka, mereka bekerja menguras tenaga untuk memproduksi suatu barang yang jelas merupakan keuntungan bagi seorang produsen dengan harapan mereka mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan pekerjaan mereka, namun kenyataannya upah yang mereka terima sangat rendah. Kemiskinan yang terus membelenggu juga berdampak pada tingginya tingkat kriminalitas, tindakan tersebut mereka lakukan hanya satu alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dalam kenyataan yang terjadi di Sumatera Barat, penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan masih belum bisa dikatakan optimal. Jumlah penduduk miskin masih cukup besar artinya disini jumlah penduduk miskin yang ada termasuk daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin yang jumlahnya tidak sedikit. Menurut hasil yang diperoleh jumlah penduduk miskin yang ada di Sumatera Barat terus berfluktuasi. Tingkat kemiskinan yang berfluktuasi tersebut dapat dilihat dari data yang diperoleh dari BPS tahun 2005-2010 sebagai berikut:

Tabel 1. Tingkat Kemiskinan di Sumatera Barat tahun 2005-2010

Tahun	Jiwa	%	Garis Kemiskinan
2005	482.800	10,89	Rp 140.962 perkapita / bulan
2006	550.251	12,51	Rp 146.781 perkapita/ bulan
2007	529.200	11,90	Rp 180.669 perkapita / bulan
2008	477.200	10,67	Rp 195.733 perkapita/ bulan
2009	429.250	9,54	Rp 217.649 perkapita/ bulan
2010	430.024	9,50	Rp 230.823 perkapita / bulan
Penurunan		0,04	

Sumber: BAPPEDA Sumbar

Dari data yang diperoleh dapat dilihat bahwasanya tingkat kemiskinan yang terdapat di Sumatera Barat dari tahun 2005-2010 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2005 jumlah penduduk miskin berjumlah 482.800 dengan persentase 10,89%. Pada tahun ini penduduk dikatakan miskin jika tingkat pendapatan perkapita yang mereka terima \leq Rp 140.962 per bulannya. Pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin yang ada di Sumatera Barat mengalami peningkatan sebesar 550.251 jiwa dengan persentase 12,51%. Pada tahun ini tingkat kemiskinan yang ada jauh lebih besar dari apa yang diharapkan yaitu sebesar 12,07%. Pada tahun ini penduduk dikatakan miskin jika tingkat pendapatan perkapita yang mereka terima sebesar \leq Rp 146.781 perbulannya. Begitu juga pada tahun 2007 tingkat kemiskinan yang terjadi di Sumatera barat juga tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah yaitu sebesar 11,26%. Pada tahun ini jumlah penduduk miskin yang ada di Sumatera Barat sebesar 529.200 dengan persentase 11,90%. Ditahun ini penduduk dikatakan miskin jika tingkat pendapatan perkapita yang mereka terima sebesar \leq Rp 180.669 perbulannya. Pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat mengalami penurunan dan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat jauh dibawah yang sudah ditargetkan oleh pemerintah yaitu sebesar 10,85%. Pada tahun ini jumlah kemiskinan di Sumatera Barat tercatat 477.200 jiwa dengan persentase 10,67%. Pada tahun ini penduduk dikatakan miskin jika penduduk menerima pendapatan perkapita \leq Rp 195.733 perbulannya. Begitu juga pada tahun 2009 dan 2010 jumlah penduduk miskin yang tercatat juga kurang dari target yang ditetapkan oleh pemerintah. Ditahun 2009 target tingkat kemiskinan yang ditetapkan pemerintah adalah sebesar 10,44%. kenyataannya pada tahun ini jumlah penduduk miskin yang tercatat adalah sebesar 429.250 dengan persentase 9,54%. Pada tahun ini penduduk dikatakan miskin jika pendapatan perkapita yang mereka terima \leq Rp 217.649 perbulannya. Pada tahun 2010 terjadi penerunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,04% yaitu 430.024 dengan persentase 9,50%. Pada tahun ini penduduk dikatakan miskin jika pendapatan perkapita yang mereka terima \leq Rp 230.823 perbulannya.

Dari paparan yang telah diuraikan diatas hendaknya dapat menjadi acuan bagi pemerintah agar dalam menetapkan kebijakan-kebijakan lebih menitik beratkan pada hal bagaimana kebijakan tersebut dapat menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat miskin. Sehingga dengan kebijakan yang ada dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran yang ada di Sumatera Barat.

Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Kemiskinan juga terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam suatu masyarakat atau yang mengatakan bahwa kemiskinan merupakan ketidakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap system yang diterapkan oleh suatu pemerintah sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplotasi (kemiskinan struktural). Tetapi pada umumnya, ketika orang berbicara tentang kemiskinan yang dimaksud adalah kemiskinan material. Dengan pengertian ini maka seseorang masuk dalam kategori miskin apabila tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak.

Bappenas (2004) mendefenisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan dan ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik baik bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat Bappenas menggunakan pendekatan kebutuhan

dasar (*basic needs approach*), pendekatan pendapatan (*income approach*), pendekatan kemampuan dasar (*human capability approach*), dan pendekatan *objective and subjective*.

Menurut Bank Dunia (2003) penyebab dasar kemiskinan adalah: 1) kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal, (2) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar sarana dan prasarana, (3) kebijakan pembangunan yang bias kota dan bias sektor, (4) adanya perbedaan kesempatan diantara masyarakat dan system yang kurang mendukung, (5) adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sector ekonomi tradisional dan ekonomi modern, (6) rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dan masyarakat, (7) budaya hidup yang dikatkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya. Lebih lanjut menurut Bank Dunia indikator utama kemiskinan adalah kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, terbatasnya saran prasarana yang dibutuhkan, pembangunan yang bias kota, perbedaan kesempatan diantara kelompok masyarakat, perbedaan sumber daya manusia sektor ekonomi, rendahnya produktivitas, budaya hidup yang jelek tata pemerintahan yang buruk.

Menurut Meier dan James E Rauch (2008:18) kemiskinan ditekankan pada kebutuhan dimana kemiskinan adalah berupa ketidakmampuan suatu masyarakat untuk mencapai standar kehidupan minimal. Disisi lain menurut Haryana (2008:1) mengemukakan bahwa kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang, laki-laki dan perempuan tidak terpenuhi hak-hak untuk memperoleh atau mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermakana. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan mereka sebagai individu.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau studi kepustakaan yang dijadikan sebagai referensi dalam menganalisis persoalan-persoalan yang muncul, terutama mengenai masalah kemiskinan di Sumatera Barat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Kemiskinan Sumatera Barat

Sumatera Barat juga tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Angka kemiskinan mengalami fluktuasi dari tahun ketahunnya. Salah satu factor penyebab penduduk masuk pada kriteria garis penduduk miskin ditandai dengan pendapatn perkapita mereka yang rendah perbulannya. Dengan tingkat pendapatan mereka yang rendah tersebut tentunya mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehingga pada akhirnya mereka tergolong dalam dalam penduduk miskin.

Tabel 2. Tingkat Kemiskinan di Sumatera Barat tahun 2005-2010

Tahun	Jiwa	%	Garis Kemiskinan
2005	482.800	10,89	Rp 140.962 perkapita / bulan
2006	550.251	12,51	Rp 146.781 perkapita/ bulan
2007	529.200	11,90	Rp 180.669 perkapita / bulan
2008	477.200	10,67	Rp 195.733 perkapita/ bulan
2009	429.250	9,54	Rp 217.649 perkapita/ bulan
2010	430.024	9,50	Rp 230.823 perkapita / bulan
Penurunan		0,04	

Sumber: BAPPEDA Sumbar

Dari data yang diperoleh dapat dilihat bahwasanya tingkat kemiskinan yang terdapat di Sumatera Barat dari tahun 2005-2010 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2005 jumlah penduduk miskin berjumlah 482.800 dengan persentase 10,89%. Pada tahun ini penduduk dikatakan miskin jika tingkat pendapatan perkapita yang mereka

terima \leq Rp 140.962 per bulannya. Pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin yang ada di Sumatera Barat mengalami peningkatan sebesar 550.251 jiwa dengan persentase 12,51%. Pada tahun ini tingkat kemiskinan yang ada jauh lebih besar dari apa yang diharapkan yaitu sebesar 12,07%. Pada tahun ini penduduk dikatakan miskin jika tingkat pendapatan perkapita yang mereka terima sebesar \leq Rp 146.781 perbulannya. Begitu juga pada tahun 2007 tingkat kemiskinan yang terjadi di Sumatera barat juga tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah yaitu sebesar 11,26%. Pada tahun ini jumlah penduduk miskin yang ada di Sumatera Barat sebesar 529.200 dengan persentase 11,90%. Ditahun ini penduduk dikatakan miskin jika tingkat pendapatan perkapita yang mereka terima sebesar \leq 180.669 perbulannya. Pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat mengalami penurunan dan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat jauh dibawah yang sudah ditargetkan oleh pemerintah yaitu sebesar 10,85%. Pada tahun ini jumlah kemiskinan di Sumatera Barat tercatat 477.200 jiwa dengan persentase 10,67%. Pada tahun ini penduduk dikatakan miskin jika penduduk menerima pendapatan perkapita \leq Rp 195.733 perbulannya. Begitu juga pada tahun 2009 dan 2010 jumlah penduduk miskin yang tercatat juga kurang dari target yang ditetapkan oleh pemerintah. Ditahun 2009 target tingkat kemiskinan yang ditetapkan pemerintah adalah sebesar 10,44%. kenyataanya pada tahun ini jumlah penduduk miskin yang tercatat adaalah sebesar 429.250 dengan persentase 9,54%. Pada tahun ini penduduk dikatakan miskin jika pendapatan perkapita yang mereka terima \leq Rp 217.649 perbulannya. Pada tahun 2010 terjadi penerunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,04% yaitu 430.024 dengan persentase 9,50%. Pada tahun ini penduduk dikatakan miskin jika pendapatan per kapita yang mereka terima \leq Rp 230.823 perbulannya.

Selain dengan rendahnya pendapatan perkapita penduduk maka salah satu faktor yang identik dengan kebutuhan pokok yaitu kebutuhan pangan. Indikator yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk adalah tingkat kecukupan gizi yang disajikan dalam unit kalori dan protein. Apabila patokan yang digunakan untuk menentukan tingkat kecukupan konsumsi kalori dan protein perkapita perhari adalah patokan Departemen Pertanian, yaitu 2000 kalori dan 45 gram protein maka rata-rata konsumsi kalori penduduk Sumatera Barat tahun 2002 (BPS) sudah memenuhi standar yaitu sebesar 2109,11 kalori. Begitu juga dengan rata-rata konsumsi protein yaitu sebesar 55,98 gram sudah di atas standar. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata konsumsi kalori dan protein perhari penduduk Sumatera Barat sudah memenuhi standar yang ditentukan.

Walaupun tingkat konsumsi kalori dan protein penduduk sudah memenuhi standar yang ditentukan, akan tetapi kemiskinan masih tetap ada dan sangat sulit untuk dientaskan. Hal ini disebabkan oleh adanya suatu lingkaran yang melingkupi penduduk miskin tersebut. Oleh karena itu cara yang paling tepat yang harus dilakukan adalah dengan memutuskan rantai kemiskinan tersebut. Langkah tersebut memang tidak mudah karena tidak bisa dilakukan dari satu sisi saja. Akan tetapi semua aspek yang ada dalam lingkaran sama-sama dibangun. Artinya kebijakan pembangunan yang paling tepat adalah menetapkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada penduduk miskin agar dapat terlepas dari lingkaran kemiskinan yang selalu membelenggu. Selain itu pembangunan diseluruh bidang harus digalakkan agar dapat saling mendukung guna mengentaskan masalah kemiskinan yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan upaya dalam mengatasi kemiskinan yang melanda Sumatera Barat dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat berkelanjutan agar tujuan untuk menuntaskan masalah kemiskinan dapat tercapai.

Kebijakan dan Program Pemerintah Dalam Penanganan Masalah Kemiskinan

Masalah kemiskinan di Sumatera Barat yang terus ada dan bersifat khas digabung dengan prioritas pemerintah dan kemampuan finansial terbatas untuk menangani

masalah kemiskinan masih jauh dari apa yang diharapkan. Akan tetapi pemerintahan tidak tinggal diam begitu saja dan melihat atau menjadi penononton yang baik dalam menghadapi permasalahan ini. Berbagai cara sudah dilakukan oleh pemerintahan daerah Sumatera Barat, mulai dari peningkatan anggaran yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan dan program/kegiatan yang sangat mendukung program pengentasan kemiskina.

Selama ini kebijakan penanggulangan kemiskinan didesain secara sentralistik, namun dengan adanya pemberian otomi daerah yang seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah masing-masing maka pemerintahan Sumatera Barat telah berupaya untuk dapat mengentaskan kemiskinan secara efektif dan efisien. Peningkatan anggaran yang diperuntukkan untuk menjalankan program-program pengentasan kemiskinan pun dilakukan. Peningkatan anggaran dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Alokasi Anggaran Terkait Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2007-2009

Tahun	Alokasi Anggaran
2007	1.075.505.411.441
2008	1.188.010.093.813
2009	1.197.653.997.283

Sumber: BAPPEDA SUMATERA BARAT

Berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat bahwa pemerintah benar-benar serius dalam mengatasi masalah kemiskinan yang ada. Pada tahun 2007 telah dialokasikan dana sebesar Rp 1.075.505.411.441. Dana tersebut diperoleh dari APBD daerah sebesar Rp 711.305.586.091, P2KP sebesar Rp 26.900.000.000-, PPK sebesar Rp 59.321.366.351-, PPIP sebesar 27.000.000.000-, BOS sebesar Rp 250.978.459.000-, Raskin dalam bentuk beras sebesar 323.252.000 kg. Pada tahun 2008 dan 2009 terjadi peningkatan anggaran yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan yang terjadi di Sumatera Barat. Tahun 2008 telah dianggarkan dana sebesar Rp 1.188.010.093.813-, dan ditahun 2009 meningkat menjadi Rp 1.197. 653.997.283-,

Dari anggaran tersebut dilaksanakanlah program-program kemiskinan yang bersifat kerakyatan. Artinya program tersebut benar-benar ditujukan bagi penduduk yang masuk dalam kategori miskin. Adapun program /kegiatan yang telah dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan tahun 2010 yaitu:

Tabel 4. Program/Kegiatan penanggulangan kemiskinan tahun 2010

Uraian	Program/kegiatan	Alokasi Dana
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Bea siswa anak keluarga miskin yang kurang mamputingkat SLTP • Penyediaan bea siswa bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu • Beasiswa bagi keluarga miskin berprestasi di Timur Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> • 10,3 M • 6 M • 1,1 M
Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Jamkesda • Pemulangan dan rujukan pasien miskin • Jasa pemulangan dan pengobatan pasien • Pelayan penduduk miskin • Kesehatan rujukan pasienkeluarga miskin dan terlantar 	<ul style="list-style-type: none"> • 3,5 M • 90 Juta • 39 Juta • 610 Juta • 180 Juta

Pengelolaan air minum dan air limbah	<ul style="list-style-type: none"> • Monev pamsimas • Kooerdinasi pamsimas • Koordinasi P2KP • Koordinasi dan monev KMN • Koordinasi perencanaan dan penanggulangan kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 Juta • 95 Juta • 100 Juta • 225 Juta • 75 Juta
Kesejahteraan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan beras untuk panti swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • 2.1 M
Tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dan pelatihan keterampilan • Padat karya produktif 	<ul style="list-style-type: none"> • 2,5 m • 1,78 M
Raskin	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan pengawasan pendistribusian beras bagi keluarga miskin 	<ul style="list-style-type: none"> • 40 Juta
Pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Penunjang PNPM • KMN 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 M • 28 M

Sumber: BAPPEDA Sumatera Barat.

Dari data di atas terlihat bahwa fokus kegiatan program pengentasan kemiskinan pemerintah terfokus pada bidang pendidikan dan bidang ketenagakerjaan. Dalam bidang pendidikan alokasi dana yang sudah dikucurkan adalah ± Rp 17,4 milyar yang dignakan untuk sebagian besar adalah pemberian beasiswa bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. Selain itu peningkatan kualitas tenaga kerja juga menjadi fokus perhatian pemerintah. Alokasi dana yang sudah diturunkan adalah sebesar ± Rp 4,3 milyar yang sebagian besar digunakan untuk pendidikan dan pelatihan dan keterampilan. Fokus kegiatan pada bidang pendidikan dan tenaga kerja ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas keberfungsian penduduk. Dengan taraf pendidikan yang meningkat diharapkan dapat menjadi pekerja yang terdidik dengan tingkat produktifitas yang tinggi sehingga nantinya pendapatan yang akan mereka terima nantinya juga akan semakin tinggi yang akhirnya dapat merubah kehidupan penduduk dan terlepas dari kemiskinan yang membelenggu.

Program yang telah dilakukan oleh pemerintah tersebut mempunyai dampak yang positif terhadap berkurangnya penduduk miskin dan pengangguran yang ada di Sumatera Barat. Dari data yang diperoleh dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan dan pengangguran di Sumatera Barat lebih rendah jika dibandingkan tingkat kemiskinan dan pengangguran secara nasional.

Tabel 5. Penurunan jumlah pengangguran di Sumatera Barat tahun 2005-2010

Tahun	Sumatera Barat		Nasional	
	Orang	%	Orang	%
2005	264.307	13,34	11.899.270	11,24
2006	243.525	11,87	10.093.200	10,28
2007	217.305	10,31	10.011.140	9,11
2008	171.134	8,04	9.394.520	8,39
2009	172.253	7,90	9.258.964	8,14
2010	172.084	-	-	-

Sumber: BAPPEDA Sumatera Barat

Dari data yang diperoleh informasi bahwa program yang dilakukan untuk mengatasi kemiskinan yang berfokus pada peningkatan kualitas tenaga kerja telah dirasakan dampaknya terhadap tingkat pengangguran yang semakin menurun. Jika dilihat pada tahun 2005-2007 tingkat pengangguran yang ada di Sumatera Barat lebih besar jika dibandingkan tingkat pengangguran secara nasional. Pada tahun 2005 persentase jumlah pengangguran adalah sebesar 13,34% sedangkan secara nasional adalah sebesar 11,24%. Begitu juga pada tahun 2006 dan 2007. Akan tetapi pada tahun 2008 dan 2009 persentase

pengangguran yang ada di Sumatera Barat bisa dikatakan lebih rendah jika dibandingkan dalam skala nasional. Kenyataan tersebut bisa diasumsikan karena adanya kebijakan dan program-program yang dilakukan benar-benar bersifat kerakyatan dan berpihak kepada penduduk miskin (*option for the poor*).

Selain program yang telah dilakukan diatas pemerintah juga sudah melakukan bagaimana cara untuk memutuskan pewarisan kemiskinan antar generasi, hak anak dan peranan perempuan. Kemiskinan yang seringkali diwariskan dari generasi kegenerasi berikutnya. Karena itu rantai pewarisan kemiskinan harus diputus. Meningkatkan pendidikan dan peranan perempuan dalam keluarga adalah salah satu cara untuk memutus rantai kemiskinan. Benerapa program yang dikembangkan adalah: 1) Program pemberian bantuan sarana dan beasiswa untuk masyarakat miskin, 2) Program pemberian makanan tambahan bagi anak-anak miskin di sekolah, 3) Program magang, dan 4) Program pemberdayaan perempuan melalui kegiatan produktif.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bappeda Sumbar, 2010. *Target dan Capaian Penanggulangan Kemiskinan di Sumatera Barat*. Padang. Bappeda
- Bappenas, 2004. *Karakteristik Masyarakat Miskin*. Bappenas
- Gregorius s. 2005. *Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan*. (<http://www.ekonomirakyat.com> diakses pada tanggal 08 Januari 2011).
- Jhingan M.L. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: CV Rajawali
- Todaro, Michael P dan C Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.